



► PROGRAM PENDIDIKAN

SD Swasta Siap Gratis Asal Anggaran Sesuai

DANUREJAN—Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI meninjau kesiapan sekolah di daerah untuk realisasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sekolah dasar negeri dan swasta gratis. Di Jogja, sekolah swasta siap menggratiskan biaya pendidikan jika mendapat anggaran setara kebutuhan tanpa menurunkan kualitas.

Perwakilan Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Totok Hedi Santoso, menjelaskan jajarannya telah bertemu dan berdiskusi dengan *stakeholder* seperti sekolah negeri, sekolah swasta, maupun dinas pendidikan di kabupaten/kota di DIY, di Kepatihan, Senin (7/7).

“Hal yang paling penting bagi saya dalam pertemuan ini adalah, sekolah swasta di Jogja untuk pendidikan dasar menjadi orientasi utama masyarakat. Dari pihak sekolah swasta sendiri

menyatakan mereka telah menjadi harapan masyarakat,” katanya.

SD Muhammadiyah Sapen misalnya, sampai 2031 sudah ada pendaftarannya. Beberapa sekolah swasta favorit lain juga mengalami hal yang sama. “Namun, problem utamanya adalah, untuk menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan harapan dan mutu tersebut, mereka membutuhkan biaya yang tidak sedikit,” katanya.

Selama ini mereka menggunakan sistem subsidi silang. Sekian persen murid merupakan anak dari keluarga sangat kaya, sekian persen dari kalangan menengah dan sekian persen siswa dari keluarga miskin. “Subsidi silang ini sudah dikelola oleh sekolah untuk mencapai standar mutu yang mereka inginkan,” katanya.

Jika keputusan MK tentang

pendidikan gratis ini dijalankan dan biaya pendidikan juga diberikan oleh pemerintah, maka pada prinsipnya mereka tidak keberatan, asalkan jumlah anggaran yang diberikan pemerintah sesuai dengan biaya operasional yang selama ini mereka jalankan. “Namun, jika kebijakan itu bersifat umum, disamaratakan dengan sekolah lain, maka mereka tidak menolak, tetapi dengan risiko mutu pendidikan mereka akan turun. Kurang lebih itu inti dari pertemuan tadi,” ungkapnya.

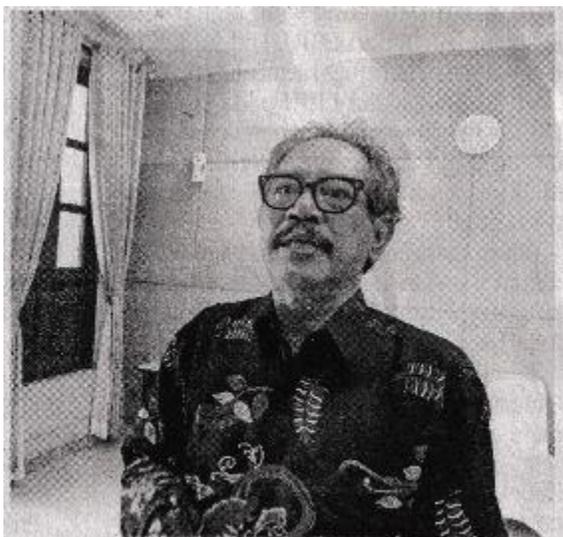
Jika menggunakan contoh SD Muhammadiyah Sapen, maka biaya yang dibutuhkan per tahun sebesar Rp28 miliar. “Maka biaya itu harus diganti oleh pemerintah agar sekolah tidak perlu mengambil dana dari masyarakat,” kata dia.

Totok belum mengetahui berapa

besar anggaran yang bisa dialokasikan pemerintah untuk merealisasikan putusan MK ini. “Mengetahui kesiapan anggaran, kami belum tahu persis bagaimana penganggarannya,” ujarnya.

Plt Asisten Setda DIY Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat, Aris Eko Nugroho, menuturkan usulan dari sekolah, kalau keputusan MK diberlakukan, maka masalah pendanaan bisa menjadi perhatian pemerintah sehingga kualitas layanan tidak merurun. “Karena kemampuan masing-masing sekolah belum tentu sama,” katanya.

Untuk pendanaan, jika menggunakan anggaran daerah kemungkinan tidak mencukupi karena terbatas. “Kalau didanai menggunakan APBD dikhawatirkan tidak bisa optimal karena adanya keterbatasan,” katanya.



Harian Jogja/Lugas Subarkah

Perwakilan Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Totok Hedi Santoso, saat ditemui media di Kepatihan, Senin (7/7).